



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mahasiswa Pertanyakan Batas Usia Perangkat Desa, UU Desa Diuji

Jakarta, 29 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tahun 2014 Nomor 7 (UU Desa) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Senin (29/07), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang diuji teregistrasi dengan Perkara Nomor 78/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Moch Imam Djauhari seorang mahasiswa hukum.

Dalam permohonannya, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang sedang diuji. Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perangkat desa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun, Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan dalam undang-undang yang menjadi dasar pemberhentian perangkat desa. Kesulitan untuk menjadi perangkat desa dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat di desa disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai masa jabatan perangkat desa. Sebagai arena politik yang dekat dengan masyarakat, sistem pemerintahan desa seharusnya mencerminkan sistem pemerintahan pusat, termasuk ketentuan mengenai masa jabatan perangkat desa. Ketidakjelasan ini menyebabkan masa jabatan perangkat desa tidak memiliki kepastian dan menghambat hak Pemohon untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

Pemohon berpendapat bahwa ia mengalami kerugian potensial dalam dua hal. Pertama, tidak adanya kepastian hukum mengenai hak Pemohon sebagai warga negara untuk berperan dalam pembangunan masyarakat sebagai perangkat desa. Ketidakjelasan mengenai masa jabatan perangkat desa dapat menyebabkan perangkat desa menjabat seumur hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Angka Harapan Hidup (AHH) orang Indonesia adalah 69,93 tahun untuk laki-laki dan 73,83 tahun untuk perempuan (2022), sementara batas usia pemberhentian perangkat desa menurut ketentuan adalah 60 tahun. Sejak tahun 2010, hanya ada 5 perangkat desa baru dan 2 perangkat desa dengan hubungan keluarga. Kondisi ini menunjukkan kemungkinan masa jabatan perangkat desa yang tidak terbatas, mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui posisi perangkat desa.

Keberadaan Objek Permohonan diduga melanggar prinsip moral, karena berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk. Ketentuan dalam Objek Permohonan menciptakan diskriminasi terhadap kelompok usia tertentu yang telah memenuhi kualifikasi dan kapasitas untuk menjalankan tugas perangkat desa, namun dihalangi oleh faktor usia pejabat sebelumnya. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh perangkat desa, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tidak hanya membatasi calon perangkat desa yang berniat untuk berkontribusi secara profesional dan mengabdikan kepada masyarakat desa, tetapi juga menghambat Kepala Desa dalam melakukan perubahan struktural yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan sosial sesuai dengan visi dan misinya.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi "a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika diartikan sebagai "a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau telah berakhirnya masa jabatan kepala desa terkait." **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)